

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yaitu permasalahan global yang sering terjadi hampir diseluruh negara di dunia. Kemiskinan bukan saja dialami oleh negara berkembang maupun negara terbelakang namun merupakan salah satu masalah di negara-negara maju di dunia. Salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan yaitu negara indonesia hal tersebut terbukti karena masi banyaknya penduduk yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang masi sulit diakses, bahkan di Ibu Kota Jakarta masi ada penduduk miskin yang tersebar di penjuru kota.

Salah satu cara mengatasi kemiskinan yaitu dengan mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membuktikan sejauh mana aktivitas ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan kemiskinan yang dimana diharapkan sumber pertumbuhan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi yaitu kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Salah satu syarat untuk mengurangi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga merupakan keberhasilan suatu negara. Masi tingginya angka kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul belum maksimal. Terdapat banyak daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi

menyebabkan kesejahteraan masyarakat rendah sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan berhubungan negatif. Hal ini menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan turun. Hubungan tersebut menandakan pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat yang wajib untuk mengurangi kemiskinan (Siregar, 2008).

Kemiskinan adalah seseorang atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya permasalahan ekonomi diantaranya tingkat pendapatan yang rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap dengan kata lain menganggur. Menurut Yoghi Citra Pratama (2014) pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menjalani pendidikan yang tinggi sehingga menyebabkan individu tidak mempunyai skill dan kompetensi dalam masyarakat sehingga menimbulkan produktivitas masyarakat yang lemah dan mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan rendah hal ini tersebut dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Ketimpangan distribusi atau ekonomi yang tidak seimbang dan masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi dan masyarakat yang mempunyai pendapatan kurang serta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line), tingkat pendidikan yang rendah, harga-harga yang naik secara umum yang terus-menerus, dan pengangguran yang bertambah. Hal ini menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dimana hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain (Ni Ketut Eni dan Made Henny, 2016).

Cutler dan Katz (1991) menemukan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan beberapa variabel ekonomi makro. Peneliti membuktikan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan saling memiliki keterkaitan atau saling mempengaruhi. Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat.

Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006), ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan. Salah satunya yaitu pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan sumber daya manusia menjadi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Ridzky Giovanni (2018) menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Azizi (dalam Dadan Hidayana 2009:28-29) menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal tersebut menyebabkan individu tidak mempunyai keterampilan untuk digunakan atau dikembangkan karena kurangnya skill atau rendahnya pendidikan. Pendidikan dan keterampilan yang terbatas dapat memicu keterbatasan untuk masuk ke dalam dunia kerja sehingga menimbulkan kemiskinan.

Dalam pandangan islam kemiskinan muncul karena kebutuhan pokok atau kebutuhan Primer masyarakat tidak terpenuhi. Kebutuhan primer yang dimaksud yaitu pangan, sandang dan papan. Terdapat firman Allah SWT mengenai kemiskinan yaitu sebagai berikut:

Potongan surah Al-Baqarah ayat 233 yang berunyi: **وَ عَلَى الْمَوْلَىٰ رِزْقُهُنَّ** yang artinya Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang makruf atau baik.

Potongan surah lainnya terdapat dalam surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi: *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ* yang artinya tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu.

Adapun dalam hadist Rasulullah SAW bersabda : Ingatlah bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (HR Ibnu Majah).

Hadist dan potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan primer sangat berkaitan erat dengan kehidupan setiap individu sehari-hari. Jika sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi dapat menimbulkan mundurnya eksistensi manusia. Sehingga di dalam islam kemiskinan dianggap sesuatu yang bisa dihempuskan oleh setan sebagaimana firman allah dalam potongan surah al-Baqarah ayat 268: *الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ* yang artinya setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi pemerintah menerapkan program pemulihan ekonomi dengan tujuan mengurangi fakir miskin di negaranya sehingga kebutuhan pokok umat manusia terpenuhi dan hidup dengan layak.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian timur. Kemiskinan yang terjadi di daerah kabupaten Gunung Kidul masi tergolong tinggi dari beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul yaitu kurangnya persediaan air bersih. Jika masyarakat masih memanfaatkan air hujan atau sumur yang tidak terlindung dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya maka masyarakat tersebut termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Terbatasnya sumber air bersih terutama pada masyarakat miskin akan berdampak pada kesehatan dan lingkungan tempat

tinggal yang rendah sehingga masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kualitas pendidikan penduduk karena sering absen atau pendapatan masyarakat hanya digunakan untuk berobat. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan air bersih di wilayah tersebut mengakibatkan masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Masi tingginya kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat dari tabel persentase kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2016-2018 di bawah ini:

Tabel 1.1.
kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Kulon Progo	20.30	20.03	18.30
Bantul	14.55	14.07	13.43
Gunung Kidul	19.34	18.65	17.12
Sleman	8.21	8.13	7.65
Kota Yogyakarta	7.70	7.64	6.98
Prov. D.I Yogyakarta	13.34	13.02	12.13

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Data diatas menjelaskan bahwa kemiskinan di Kab. Gunung Kidul berada pada urutan kedua tertinggi dari beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016 kemiskinan yang ada di Kab. Gunung Kidul sebesar 19,34 % dibandingkan dengan Kab. Bantul yang lebih rendah dengan jumlah 14,55% tahun 2017 sebesar 18,65% dibandingkan Kab. Bantul sebesar 13,43% sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah 17,12% dibandingkan dengan jumlah kemiskinan yang berada di Kab. Bantul sebesar 13,43%.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) dalam tiga tahun terakhir kemiskinan yang terjadi di Kab. Gunung Kidul mengalami penurunan yang cukup baik dibandingkan dengan Kab. Kulonprogo. Walaupun telah mengalami penurunan

kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul masih tergolong tinggi dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemiskinan dipicu beberapa faktor salah satunya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara atau daerah. (Tambunan, 2011). Berikut ini merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2016-2018
(Persen)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Kulon Progo	4,76	5,97	10,84
Bantul	5,06	5,10	5,47
Gunung Kidul	4,89	5,00	5,16
Sleman	5,25	5,35	6,42
Yogyakarta	5,11	5,24	5,49

Sumber: BPS DIY berbagai edisi, diolah

Kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Kidul dapat kita lihat pada tabel di atas. Pada tahun 2016-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 4,89 persen di bandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar 4,76 persen dan pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo yang tumbuh paling cepat yaitu sebesar 5,97 persen hingga melebihi tingkat pertumbuhan Provinsi DIY yang hanya sebesar 5,26 persen. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan diatas lima persen dengan jumlah 5,16 persen di bandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo yang memiliki tingkat pertumbuhan paling besar yakni sebesar 10,84 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai tertinggi dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendidikan juga merupakan faktor penyebab terjadinya Kemiskinan hal ini disebabkan karena pendidikan yang rendah dapat menimbulkan pengetahuan dan keterampilan individu kurang sehingga sulit untuk masuk dalam dunia kerja. Hartono dan Azizi (dalam Dadan Hidayana 2009:28-29). Dengan pendidikan yang cukup baik, masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan keluar dari linkar kemiskinan dimasa yang akan datang (Anderson, 2012). Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh mankiw (1992) yaitu apabila pemerataan investasi pendidikan dilakukan dengan baik maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Berikut ini data rata-rata lama sekolah di provinsi DIY.

Tabel 1.3.

**Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di provinsi DIY
2016-2018**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Bantul	9,09	9,20	9,35
Sleman	10,64	10,65	10,66
Gunungkidul	6,62	6,99	7,00
Kulon Progo	8,50	8,64	8,65
Kota Yogyakarta	11,42	11,43	11,44
DIY	9,12	9,19	9,32

**BPS DIY (data diolah)*

Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di provinsi DIY pada tahun 2016-2018 telah mengalami peningkatan di setiap kabupaten termasuk kabupaten Gunungkidul. Pada Tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah kabupaten Gunungkidul sebesar 6,62 persen, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,99 persen sedangkan pada tahun 2018 merupakan angka rata-rata tertinggi sebesar 7,00 persen, akan tetapi, hal tersebut belum mencapai target pendidikan maksimal 15 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah di usulkan *United Nation Development Programs (UNDP)*. Hal tersebut membuktikan umumnya masyarakat

Kabupaten Gunung Kidul belum menyelesaikan studi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Faktor lainnya yang menyebabkan kemiskinan yaitu pengangguran. Naiknya tingkat pengangguran dapat menaikkan kemiskinan pada suatu negara atau daerah tersebut (Cutler dan Katz, 1991). Dibawah ini data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DIY
2016-2018 (Persen)

Kab/Kota	2016	2017	2018
Bantul	3,12	2,72	3,06
Sleman	3,51	5,78	5,76
Gunung Kidul	1,68	7,85	10,60
Kulon Progo	2,37	1,99	1,49
Kota Yogyakarta	5,08	5,08	6,22
DIY	2,72	3,02	3,35

**BPS DIY berbagai edisi, diolah*

Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota DIY dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif. Pada tabel diatas jumlah tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 tertinggi adalah kabupaten Kota Yogyakarta di kuti dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo sedangkan jumlah terendah penganggur pada periode yang sama yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 2017 sampai 2018 Kabupaten Gunung Kidul mengalami penigkatan yang cukup tinggi yakni 7,85 dan 10,60 persen.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara maupun daerah-daerah termasuk daerah Kab. Gunung Kidul. Berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskian tersebut akan tetapi masih tetap tergolong tinggi dari beberapa Kabupaten yang ada.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan judul “**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2016-2018**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari tujuan awal yang diharapkan dan dapat mempermudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2016-2018.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi periode 2016-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan terhadap kemiskinan yang ada di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten Gunung Kidul tahun 2016-2018.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga faktor-faktor apa saja yang dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada disuatu negara atau wilayah.
2. Dapat menambah khasanan ilmu ekonomi dan wawasan khususnya ekonomi pembangunan agar dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkapkan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Dapat menjadi bahan untuk wacana perpustakaan, baik di tingkat fakultas maupun universitas.
4. Dapat menjadi sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya.

